

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengukuran kinerja diperlukan dalam suatu instansi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan atau bahan evaluasi sebuah instansi dalam merealisasikan anggaran. Salah satu media dalam mengukur kinerja instansi adalah dengan mengukur realisasi anggarannya, seperti yang tercantum pada PMK No 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Presentase realisasi dan target anggaran instansi akan dibandingkan dengan tingkat efektifitas penyerapan anggaran.

Dari kerja praktik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target anggaran belanja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari pendapatan negara yang telah diterima oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Target anggaran digunakan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan anggaran. Menurut PMK 249/PMK.02/2011 realisasi anggaran dapat digunakan sebagai data dalam mengukur kinerja instansi. Realisasi dan Anggaran yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mengalami selisih pada setiap tahunnya, selisih yang terjadi antara realisasi dan anggaran tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

2. Pengukuran kinerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat akan dikatakan sangat efektif pada saat mencapai >80%, efektif untuk 80%-60%, tidak efektif 60%-50% dan sangat tidak efektif pada tingkat <50%. Presentase realisasi terhadap anggaran belanja negara pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sudah sangat efektif karena telah mencapai tingkat >80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya realisasi terhadap anggarannya akan semakin meningkatkan kualitas kinerja yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

5.2 **Saran**

Dalam melakukan praktik kerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat pada Sub.Bag.Keuangan, penulis menyatakan bahwa kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sudah terlaksana dengan baik, namun tentu saja hal tersebut belum dikatakan sempurna karena masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah :

1. Sebaiknya dalam proses merealisasikan anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat lebih mengoptimalkan kinerjanya sehingga presentase realisasi terhadap anggarannya yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dan dapat meminimalisir selisih antara realisasi dan anggaran.
2. Sebaiknya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat tidak hanya mencantumkan anggaran belanja barang saja pada laporan keuangan tetapi juga

bagaimana anggaran belanja lainnya, seperti anggaran belanja pegawai, dan belanja modal serta dapat mencantumkan berapa besar pendapatan Negara yang telah diterima oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

